



HASIL DISKUSI KELOMPOK FGD 2 – 30 Maret 2019

C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana	C.1. Pengembangan strategi pengurangan risiko bencana	Penilaian berkala terhadap risiko bencana Perlu ada tambahan kebijakan aksi PRB dan Renko (rencana konvergensi) termasuk SOP	<ul style="list-style-type: none"> • Pergub 143/2015 tentang rencana penanggulangan bencana (RPB) 2014-2019 • PP 2/2018 tentang standar pelayanan minimal • Permendagri 101/2018 tentang panduan teknis pelayanan dasar • UU 24/2007 tentang Penanggulangan Bencana • Ada Indeks Risiko Bencana sedetail provinsi yang dilakukan nasional • Harusnya ada keterkaitan dari dokumen risiko dan jalur evakuasi
		Menyediakan jalur evakuasi dan ruang evakuasi yang memadai	<ul style="list-style-type: none"> • Ambil dari SPM 101/2018 • Jalur dan ruang evakuasi harus sesuai dengan bencana yang dialami oleh daerah • Kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana harus ditingkatkan • Belum ada kajian terkait jalur dan ruang evakuasi di Indonesia. Masih memerlukan data untuk mengetahui jalur evakuasi. Pengumpulan informasi tidak hanya dari pemerintah tapi juga dari masyarakat • Penggunaan teknologi untuk PRB untuk memberikan informasi pada umum jika ada bencana (<i>sistemnya real-time</i>) • Penanganan bencana harus menggunakan kacamata masyarakat
		Menerapkan prinsip pembangunan yang berketahanan	<ul style="list-style-type: none"> • Harus ada kalimat yang lebih implementatif yaitu pembangunan berketahanan melalui ABC di DEF • Perlunya penegakan pada pelaksanaan SPM (standar teknis), perizinan dan pendampingan masyarakat • Instrumen Lokal Pengendalian di PSN seperti di sekitar jalur KCIC (2018), Pengamanan Bandara Soekarno Hatta, Jalan TOL Jakarta-Merak, TOL Jakarta-Cikampek di sekitar bantaran Kali Ciliwung • Draft Rapermen Kawasan Sempadan Danau (masih disusun)
		Pengamanan kawasan tepian pantai Pengamanan kawasan vital berisiko	<ul style="list-style-type: none"> • Kurang kontekstual di DKI, ancaman di DKI lebih banyak terkait kebakaran, banjir, angin kencang, gempa
		Peningkatan kapasitas pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kapasitas harus masyarakat dan pemerintah daerah • Pemerintah telah memiliki peraturan terkait Gerakan Warga Cegah Kebakaran
		Penyediaan early warning system dan peningkatan early action dari masyarakat. Di Jakarta sudah ada EWS terkait banjir	DKI bisa membuat keberlanjutan bisnis. Kebijakan yang sudah ada harus dicek lagi yang sudah ada apa yang belum ada. Semua peraturan harus di cek lagi apakah masih berlaku. Peraturan tersebut harus dipetakan dan apa dilihat keterkaitannya dengan dinas lain

C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana	<p>C.2. Penggunaan pendekatan proaktif, berbasis risiko, dan masyarakat</p> <p>Pendekatan penyelenggaraan penanggulangan risiko bencana berbasis masyarakat setempat</p> <p>Sedang ada penyusunan Desain Besar Penanggulangan Bencana Berbasis Komunitas</p>	<p>Menjadikan warga lokal sebagai aktor pelaksana tanggap bencana</p> <p>Mengkolaborasikan masyarakat setempat dalam hal penyelenggaraan pra saat dan pasca bencana</p> <p>Di Pra → kesepakatan simulasi Bersama, kawasan evakuasi Bersama Saat → kesepakatan pembentukan tim penanggulangan Bersama Pasca → kesepakatan tim psiko social</p> <p>Peran pemerintah daerah → memberdayakan masyarakat untuk menjadi aktor dalam penanggulangan bencana bersama</p>	<ul style="list-style-type: none"> Peran serta masyarakat dalam pembangunan kota Tangguh harus ditekankan Peningkatan kapasitas masyarakat untuk mengidentifikasi potensi bencana di sekitar masyarakat. Masyarakat sudah banyak berpartisipasi termasuk dalam pembangunan IPAL Komunal
	<p>Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai risiko bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> DKI menginisiasi Gerakan cegah dalam bencana kebakaran: Pemerintah mengajak masyarakat mencegah bencana dengan memberikan info kepada masyarakat bencana apa saja yang terjadi di lingkungan masyarakat 	
	<p>Menerapkan prinsip 'membangun kembali dengan lebih baik'</p>	<ul style="list-style-type: none"> Lebih baik di bidang apa harus difokuskan sehingga ketika disampaikan ke pemda lebih jelas 	
	<p>Mendorong pengembangan asuransi bencana</p>	<ul style="list-style-type: none"> Saat ini ada asuransi untuk kebakaran. Mekanisme di pemerintah daerah untuk support premi asuransi kebencanaan (microfinance) 	

C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
C. Pengurangan dan Manajemen Risiko Bencana	C.3. Aksi iklim di semua tingkatan	Membangun ketahanan terhadap gas rumah kaca dan mengurangi emisi gas rumah kaca	<ul style="list-style-type: none">• Sudah ada RAD GRK• Dinas KP KP memberikan bibit hidroponik di RTH. Ada alat untuk mengukur kualitas (polusi) udara di RPTRA• Penggunaan energi ramah lingkungan seperti solar cell.
	Aksi mitigasi, pencegahan, adaptasi iklim di semua tingkatan	Menyusun aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat lokal	
			mengurangi emisi gas rumah kaca

D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu	D.1. Proses perencanaan upaya adaptasi jangka menengah dan jangka panjang	Mendukung analisis dampak dan kerentanan bencana maupun perubahan iklim pada tingkat provinsi, kota/kabupaten, dan kelurahan.	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis harus memprioritaskan kawasan rentan yang dapat menjadi kawasan percontohan pengurangan risiko bencana. - Analisis harus diakomodasi dalam bentuk kebijakan serta aksi yang dapat langsung diterapkan di tingkat kelurahan.
		Mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan pada berbagai sektor (contoh: sektor perumahan, transportasi, bangunan gedung, dsb)>	<ul style="list-style-type: none"> - Perlu dikaitkan dengan gaya hidup ramah lingkungan
		Mendorong perencanaan mitigasi dan adaptasi bencana dan perubahan iklim pada kawasan rentan yang menargetkan kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> - Penentuan kawasan percontohan → prioritas - Membentuk kelompok cepat tanggap darurat, khusus untuk daerah rawan bencana - Kajian berbasis kawasan yang menargetkan kelompok rentan

D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu	D.1. Proses perencanaan upaya adaptasi jangka menengah dan jangka panjang	Menyusun dan mengolah sistem data/informasi mengenai kebencanaan berbasis masyarakat yang terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Data harus memuat: jumlah kawasan rentan dan jumlah kaum rentan pada kawasan tersebut. - Data perlu terintegrasi dengan data yang dikeluarkan berbagai lembaga terkait.
		Mengoptimalkan peran aktor yang lebih luas di tingkat lokal (kelurahan, organisasi masyarakat, dan akademisi/ universitas)	
		Perencanaan upaya adaptasi dan mitigasi harus berbasis riset dan teknologi	

D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu	D.2. Pengarusutamaan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana	Mengarusutamakan pengurangan dan pengelolaan risiko bencana dan perubahan iklim yang holistik .	<ul style="list-style-type: none"> - Pendekatan holistik dalam hal ini adalah lintas sektor dan tingkat pemerintahan dan masyarakat. - Contoh: keluarga sebagai agen untuk meningkatkan kesadaran risiko bencana, arus utama dalam pendidikan (formal), dan alokasi anggaran di masing-masing dinas. - Contoh: Madrasah Tanggap Bencana.
		Mengembangkan mekanisme umpan balik dan insentif untuk para "champion" di tingkat lokal.	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan demikian, inisiatif lokal yang berhasil dapat direplikasi dan menjadi motivasi bagi daerah lain.
		Penyebaran informasi kepada publik yang merata	<ul style="list-style-type: none"> - Early Warning System - Call center 112 (diintegrasikan dengan Smart City)
		Mengembangkan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, penilaian, dan pelaporan kemajuan ketahanan kota	<ul style="list-style-type: none"> • Jakarta tidak memiliki perda tentang pengurangan risiko bencana serta perlu ada badan koordinasi sehingga masalah "sylo" dapat teratasi. • Pihak swasta perlu menyediakan anggaran kebencanaan dan turut berkontribusi dalam evakuasi bencana.

D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu	D.3. Kerja sama dan koordinasi lintas sektor	Melakukan kerja sama terkait investasi infrastruktur perkotaan	- Pembayaran Imbal jasa lingkungan antara Jakarta dan daerah sekitarnya.
		Membentuk satu gugus tugas/ OPD koordinasi tingkat provinsi yang memfokuskan diri pada pengurangan dan penanggulangan risiko bencana	- Gugus tugas/OPD yang mengkoordinasikan lembaga2 yang berwenang dalam urusan kebencanaan dan perubahan iklim: BPBD, Dinas Kebakaran, Dinas Sosial, dsb.
		Membagi peran dan tanggung jawab dalam penerapan kebijakan secara jelas dan berbasis kawasan	- Pendekatan kawasan dalam pengelolaan kebencanaan diperlukan karena banyak kawasan di DKI Jakarta yang melingkupi berbagai batas adminitrasi kelurahan.

D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu

SUB-KOMPONEN	ISU	PILIHAN KEBIJAKAN/AKSI	CATATAN
D. Perencanaan dan Penerapan Kebijakan Kebencanaan dan Perubahan Iklim yang Terpadu	D.4. Penjaminan sumber daya pendanaan	Mendukung akses pendanaan multilateral	
		Mengembangkan solusi pembiayaan kreatif untuk kebencanaan dan respon perubahan iklim di luar APBN/APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sumber pendanaan lain: zakat, waqaf, infaq, sodaqoh, dan micro financing - PPP (Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha)
		Menciptakan mekanisme keberlanjutan fiscal dan utang di seluruh tingkat pemerintahan	
		Integrasi pendanaan kebencanaan dengan RPJMD	